

Spiritualitas sebagai Mekanisme Rekonsiliasi Konflik Antarwarga: Pendekatan Participatory Rural Appraisal di Desa Bayah Timur

Spirituality as a Mechanism for Inter-Citizen Conflict Reconciliation: A Participatory Rural Appraisal Approach in East Bayah Village

Siti Napsiyah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
sitinapsiyah1974@gmail.com

Ilham Nurdiansyah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ilhamazr47@gmail.com

Andara Aura Nisa

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
auranadara03@gmail.com

Muhammad Marhadika

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
muhammadmarhadika@gmail.com

Received: 19-05-2026

Revised: 10-06-2026

Accepted: 26-07-2026

Abstract

Inter-community social conflict may weaken social cohesion and reduce collective participation within local communities. This study examines the dynamics of social conflict between residents of RW 04 and RW 10 in Bungkeureuk Hamlet, Bayah Timur Village, Kab. Lebak, Banten Province and analyzes the role of spirituality as a mechanism for social reconciliation. The study employed a qualitative case study approach using Participatory Rural Appraisal (PRA). Data were collected through participatory observation, PRA documentation, and discussion records involving neighborhood leaders, religious leaders, and senior community members. PRA techniques included problem tree analysis, priority ranking matrices, and institutional Venn diagrams. The findings indicate that the conflict was shaped by historical trauma arising from disagreements in previous community activities, identity-based sentiments between native and migrant residents, and limited cross-group communication. These conditions contributed to social polarization, weakened solidarity,

and reduced participation in non-religious communal activities. However, collective spiritual practices, including Islamic Religious Celebration Events (Perayaan Hari Besar Islam), majelis taklim, and communal religious gatherings, functioned as inclusive social spaces that facilitated interaction across social boundaries. Spirituality served as an informal mechanism of reconciliation by strengthening communication, rebuilding solidarity, and restoring social cohesion. The study highlights the potential of community-based spiritual approaches as an alternative strategy for addressing horizontal social conflicts.

Keywords: *Conflict Reconciliation, Participatory Rural Appraisal, Social Cohesion, Social Conflict, Spirituality.*

Abstrak

Konflik sosial antarwarga merupakan fenomena yang dapat melemahkan kohesi sosial dan partisipasi kolektif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial antara warga RW 04 dan RW 10 Kampung Bungeureuk, Desa Bayah Timur, Kab. Lebak, Provinsi Banten serta mengidentifikasi peran spiritualitas sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dokumentasi hasil PRA, serta pencatatan diskusi partisipatif yang melibatkan ketua RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat senior. Teknik PRA yang digunakan meliputi *problem tree analysis*, matriks ranking prioritas masalah, dan diagram venn kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial dipengaruhi oleh trauma historis akibat perbedaan pendapat dalam kegiatan masyarakat sebelumnya, sentimen identitas antara warga asli dan pendatang, serta minimnya ruang komunikasi lintas kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan polarisasi sosial yang berdampak pada melemahnya solidaritas sosial dan stagnasi kegiatan kewilayahan non-keagamaan. Namun demikian, aktivitas spiritual melalui Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), majelis taklim, dan kegiatan keagamaan kolektif terbukti menjadi ruang sosial inklusif yang mempertemukan warga lintas kelompok. Spiritualitas berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi informal melalui penguatan komunikasi, solidaritas sosial, dan kohesi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual berbasis komunitas memiliki potensi sebagai strategi alternatif dalam penyelesaian konflik sosial horizontal.

Kata Kunci: Kohesi Sosial, Konflik Sosial, Participatory Rural Appraisal, Rekonsiliasi Konflik, Spiritualitas.

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Konflik muncul sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan, identitas sosial, persepsi, maupun pola interaksi antarkelompok dalam suatu komunitas. Dalam perspektif sosiologis, konflik tidak selalu dipandang sebagai kondisi destruktif, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses perubahan sosial yang menghasilkan penyesuaian hubungan antarkelompok apabila terdapat mekanisme penyelesaian yang efektif.

Lewis A. Coser menjelaskan bahwa konflik memiliki fungsi sosial tertentu, termasuk memperkuat solidaritas kelompok dan membentuk keseimbangan sosial baru apabila masyarakat memiliki ruang rekonsiliasi yang memungkinkan terjadinya pemulihan hubungan sosial.¹

Pada masyarakat pedesaan, konflik sosial umumnya dipengaruhi oleh faktor historis, perbedaan identitas sosial, kepentingan kelompok, serta lemahnya komunikasi antarwarga. Konflik horizontal yang berlangsung dalam jangka panjang berpotensi melahirkan polarisasi sosial, yaitu kondisi ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok eksklusif yang mengalami penurunan interaksi sosial, melemahnya rasa saling percaya, serta menurunnya solidaritas sosial.² Polarisasi tersebut dapat menghambat pembangunan sosial masyarakat karena menurunkan kapasitas partisipasi kolektif dan mempersempit ruang kolaborasi komunitas.³

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik sosial masyarakat umumnya dilakukan melalui pendekatan formal, seperti mediasi pemerintah desa, musyawarah warga, maupun intervensi tokoh masyarakat. Fauzi menemukan bahwa pendekatan agama memiliki kontribusi dalam mereduksi konflik sosial melalui penguatan nilai moral dan komunikasi masyarakat, namun penelitian tersebut lebih menekankan aspek dakwah sebagai instrumen resolusi konflik formal.⁴ Penelitian Hidayat dan Suryana menunjukkan bahwa strategi penyelesaian konflik masyarakat desa umumnya dilakukan melalui mekanisme administratif dan mediasi kelembagaan desa, tetapi efektivitasnya cenderung terbatas ketika konflik telah berkembang menjadi sentimen emosional yang bersifat laten.⁵ Di sisi lain, Ramadhan dan Putri menemukan bahwa spiritualitas kolektif masyarakat desa memiliki kontribusi terhadap penguatan solidaritas sosial, meskipun penelitian tersebut belum secara spesifik membahas spiritualitas sebagai mekanisme rekonsiliasi konflik antarkelompok masyarakat.⁶

Meskipun berbagai studi tersebut telah mengkaji beragam pendekatan resolusi konflik dari mekanisme formal-kelembagaan hingga penguatan nilai keagamaan dan solidaritas sosial, masih terdapat celah analisis mengenai bagaimana spiritualitas bekerja sebagai mekanisme

¹ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), 21–25.

² T. Hidayat and A. Suryana, “Dinamika Konflik Sosial Masyarakat Desa dan Strategi Resolusinya,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 17, no. 2 (2023): 101–119.

³ A. I. Sulaiman, “Modal Sosial dalam Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat Pedesaan,” *Jurnal Komunitas* 11, no. 1 (2019): 1–13.

⁴ M. Fauzi, “Pendekatan Agama dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 15, no. 1 (2021): 77–94.

⁵ Hidayat and Suryana, “Dinamika Konflik Sosial Masyarakat Desa,” 108–111.

⁶ F. Ramadhan and L. Putri, “Spiritualitas Kolektif dan Solidaritas Sosial Masyarakat Desa,” *Jurnal Community Development* 12, no. 1 (2024): 33–49.

rekonsiliasi yang bersifat *bottom-up* (bawah-atas) dalam konteks konflik antarkelompok warga yang telah mengendap menjadi ketegangan laten. Celah inilah yang coba diisi oleh kajian ini.

Kajian ini melisik fenomena menarik yang ditemukan pada masyarakat RW 04 dan RW 10 Kampung Bungeureuk, Desa Bayah Timur. Berdasarkan hasil *Participatory Rural Appraisal* (PRA), masyarakat mengalami polarisasi sosial yang dipengaruhi oleh trauma historis akibat konflik pada kegiatan masyarakat sebelumnya, sentimen identitas antara warga asli dan pendatang, serta minimnya ruang komunikasi lintas kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan sosial antarwarga mengalami ketegangan yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas kolektif non-keagamaan.

Hasil PRA menunjukkan bahwa konflik sosial antara RW 04 dan RW 10 tidak hanya memengaruhi hubungan interpersonal masyarakat, tetapi juga berdampak pada stagnasi kegiatan kewilayahan non-keagamaan, seperti Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN), melemahnya solidaritas sosial, serta terbatasnya kolaborasi pemuda lintas wilayah. Trauma konflik masa lalu bahkan mendorong sebagian masyarakat menarik diri dari aktivitas kolektif sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menghindari konflik berulang. Sentimen identitas antara kelompok warga asli dan pendatang turut memperkuat batas psikologis antarkelompok yang memperbesar potensi fragmentasi sosial masyarakat.

Menariknya, di tengah kondisi konflik tersebut, masyarakat RW 04 dan RW 10 justru menunjukkan kemampuan untuk membangun partisipasi bersama ketika berlangsung agenda spiritual, khususnya dalam momentum Perayaan Hari Besar Islam (PHBI). Aktivitas spiritual seperti pengajian, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan kolektif menjadi ruang sosial yang mampu mempertemukan masyarakat tanpa sekat kelompok. Hasil pemetaan kelembagaan melalui diagram venn menunjukkan bahwa institusi keagamaan lokal memiliki pengaruh sosial yang lebih kuat dibanding institusi administratif formal dalam membangun kedekatan emosional masyarakat.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif solidaritas sosial Émile Durkheim yang memandang agama sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi integratif dalam masyarakat. Ritual keagamaan membentuk *collective consciousness* atau kesadaran kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas sosial, dan keterikatan antaranggota komunitas.⁷ Dalam konteks masyarakat yang mengalami konflik, aktivitas spiritual tidak hanya berfungsi

⁷ Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1995), 44–52.

sebagai praktik religius, tetapi juga menjadi ruang sosial yang memungkinkan rekonstruksi komunikasi informal dan pembangunan kembali kepercayaan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai spiritualitas sebagai mekanisme rekonsiliasi konflik sosial berbasis komunitas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pendekatan formal dan administratif, penelitian ini menempatkan aktivitas spiritual masyarakat sebagai ruang rekonsiliasi sosial informal yang tumbuh secara organik dalam komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial antarwarga RW 04 dan RW 10 di Desa Bayah Timur serta mengidentifikasi bagaimana spiritualitas berperan sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial masyarakat melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa spiritualitas kolektif berfungsi sebagai infrastruktur sosial informal yang mampu menjembatani fragmentasi hubungan antarwarga ketika mekanisme formal-administratif mengalami keterbatasan. Aktivitas keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, dan ritual kolektif lainnya menciptakan “ruang aman” tempat masyarakat dapat berinteraksi tanpa terbebani oleh sentimen identitas kelompok yang selama ini menjadi penghalang. Dalam kerangka Durkheimian, ritual keagamaan berperan sebagai momen *collective effervescence* kondisi ketika individu-individu berkumpul dan berpartisipasi dalam aktivitas bersama yang membangkitkan energi kolektif, memperkuat kesadaran kolektif, dan merevitalisasi ikatan sosial yang telah melemah akibat konflik. Dengan kata lain, spiritualitas tidak sekadar menjadi praktik ibadah individual, melainkan mekanisme sosial yang secara organik merekonstruksi komunikasi informal dan membangun kembali kepercayaan sosial di antara kelompok yang terpolarisasi⁸.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) memiliki nilai strategis dalam mengungkap dinamika rekonsiliasi berbasis komunitas yang sering terlewat oleh pendekatan formal. PRA memungkinkan peneliti dan masyarakat untuk bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan potensi lokal termasuk institusi keagamaan sebagai sumber daya rekonsiliasi yang tumbuh dari bawah. Melalui diagram Venn dan pemetaan kelembagaan, penelitian ini menunjukkan bahwa institusi keagamaan lokal memiliki pengaruh sosial yang lebih kuat dibanding institusi administratif formal dalam membangun kedekatan emosional masyarakat. Implikasinya, kebijakan pembangunan sosial di wilayah pasca-konflik seyogianya tidak hanya mengandalkan mekanisme administratif, tetapi

⁸ Émile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, 2nd ed (London: Allen and Unwin, 1976).

juga mengintegrasikan dan memperkuat ruang-ruang spiritual yang telah terbukti efektif dalam merawat kohesi sosial⁹.

Akhirnya, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dan praktis bagi studi resolusi konflik berbasis komunitas. Secara teoretis, kajian ini memperluas perspektif Durkheimian tentang fungsi integratif agama dengan menunjukkan bahwa spiritualitas dapat beroperasi sebagai mekanisme rekonsiliasi *bottom-up* dalam konteks konflik laten yang telah mengendap menjadi polarisasi sosial. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan model intervensi sosial yang lebih kontekstual dan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pemulihan hubungan sosial. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menguji keberlanjutan mekanisme spiritual ini dalam jangka panjang serta membandingkannya dengan konteks komunitas lain yang memiliki karakteristik konflik serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika rekonsiliasi konflik sosial antarwarga melalui aktivitas spiritual masyarakat RW 04 dan RW 10 Kampung Bungkeureuk, Desa Bayah Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman, persepsi, serta interaksi sosial masyarakat dalam konteks alamiah. Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada fenomena spesifik berupa konflik sosial antarwilayah masyarakat yang memiliki karakteristik khas, yaitu adanya polarisasi sosial yang mengalami pencairan melalui aktivitas spiritual keagamaan.¹⁰

Penelitian dilaksanakan di RW 04 dan RW 10 Kampung Bungkeureuk, Desa Bayah Timur yang dipilih secara *purposive* berdasarkan adanya fenomena konflik sosial antarwarga yang memengaruhi hubungan sosial masyarakat. Konflik tersebut ditandai dengan rendahnya partisipasi kolektif pada kegiatan umum masyarakat, tetapi menunjukkan pola integrasi sosial pada momentum Perayaan Hari Besar Islam (PHBI). Penelitian dilakukan dalam rangka Praktikum II Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

⁹ Klara Fischer, 'Using Participatory Rural Appraisal to Research Livelihoods', in *The Routledge Handbook on Livelihoods in the Global South*, ed. Fiona Nunan, Clare Barnes, and Sukanya Krishnamurthy, Routledge International Handbooks (London ; New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2023).

¹⁰ 8 John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (California: Sage Publications, 2018), 183–186.

Jakarta yang berlangsung pada 14 Juli hingga 20 Agustus 2025. Adapun pelaksanaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai sumber utama pengumpulan data dilakukan pada 26 Juli 2025 sebagai bagian dari asesmen sosial masyarakat.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai strategi partisipatif dalam memahami dinamika sosial masyarakat. PRA dipilih karena memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam proses identifikasi masalah, pemetaan kondisi sosial, serta perumusan alternatif penyelesaian konflik secara kolektif.¹² Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian, melainkan turut berperan sebagai subjek yang aktif dalam mengidentifikasi persoalan sosial yang dihadapi.

Teknik PRA yang digunakan dalam penelitian ini meliputi problem *tree analysis* (pohon masalah), matriks *ranking* prioritas masalah, dan diagram venn kelembagaan. Problem *tree analysis* digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab, masalah inti, serta dampak konflik sosial antarwarga. Matriks *ranking* digunakan untuk menentukan faktor dominan penyebab konflik berdasarkan persepsi masyarakat, sedangkan diagram venn kelembagaan digunakan untuk memetakan aktor sosial dan tingkat pengaruh institusi dalam proses rekonsiliasi konflik masyarakat.

Sumber data penelitian diperoleh dari hasil diskusi partisipatif bersama informan kunci yang terlibat dalam proses PRA, terdiri atas Ketua RW 04, Ketua RW 10, tokoh agama, dan tokoh masyarakat senior. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap dinamika konflik sosial masyarakat RW 04 dan RW 10. Informan tersebut dipandang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi mengenai penyebab konflik, pola hubungan sosial masyarakat, serta mekanisme rekonsiliasi yang berkembang di komunitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dokumentasi hasil PRA, dan pencatatan proses diskusi partisipatif masyarakat. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami pola interaksi sosial masyarakat, khususnya dalam aktivitas spiritual seperti Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), pengajian, dan kegiatan *majelis taklim* yang menjadi ruang sosial masyarakat. Dokumentasi meliputi hasil pemetaan pohon masalah, matriks *ranking*, diagram venn kelembagaan, dokumentasi kegiatan masyarakat, serta catatan lapangan selama proses praktikum berlangsung.

¹¹ Resume Hasil PRA Rekonsiliasi Konflik Antarwarga RW 04 dan RW 10 Desa Bayah Timur, Dokumen Internal Praktikum II Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026.

¹² Robert Chambers, "Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience," *World Development* 22, no. 9 (1994): 1253–1268.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹³ Reduksi data dilakukan dengan memilah hasil PRA, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian mengenai konflik sosial dan aktivitas spiritual masyarakat. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif dan interpretasi tematik untuk memahami bagaimana spiritualitas berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi konflik antarwarga. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antara konflik sosial, ruang spiritual, dan kohesi sosial masyarakat. Sedangkan, keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dengan membandingkan hasil pemetaan PRA, observasi lapangan, serta dokumentasi penelitian guna memperoleh konsistensi data mengenai dinamika konflik dan proses rekonsiliasi sosial masyarakat.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Sosial Antarwarga RW 04 dan RW 10

Hasil *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara masyarakat RW 04 dan RW 10 Kampung Bungkeureuk, Desa Bayah Timur merupakan bentuk konflik horizontal berbasis komunitas yang berkembang melalui akumulasi pengalaman sosial masyarakat. Konflik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor historis, sosial-demografis, dan komunikasi sosial antarkelompok masyarakat. Berdasarkan hasil *problem tree analysis*, konflik dipengaruhi oleh trauma historis akibat perbedaan pendapat dalam kegiatan masyarakat sebelumnya, sentimen identitas antara kelompok warga asli dan warga pendatang, serta minimnya ruang komunikasi lintas kelompok. Konflik yang sebelumnya terjadi pada forum kepanitiaan kegiatan sosial memunculkan pengalaman emosional negatif yang menyebabkan munculnya rasa canggung, ketidakpercayaan, dan kecenderungan masyarakat untuk mengurangi keterlibatan dalam aktivitas bersama.

Hasil matriks *ranking* prioritas masalah menunjukkan bahwa trauma konflik masa lalu menjadi faktor dominan penyebab polarisasi sosial masyarakat dengan skor tertinggi sebesar 180 poin. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah sentimen identitas sosial antara warga asli dan pendatang dengan skor 160 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 12–14.

¹⁴ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), 291.

masyarakat tidak hanya dipengaruhi faktor struktural, tetapi juga pengalaman emosional kolektif yang membentuk batas psikologis antarkelompok.

Selain itu, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat pada kegiatan umum masih menunjukkan adanya batas interaksi tertentu antarkelompok. Aktivitas kewilayahan non-keagamaan seperti kegiatan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), kerja sama kepanitiaan lingkungan, serta aktivitas kepemudaan mengalami penurunan partisipasi lintas wilayah. Sebagian masyarakat cenderung memilih berpartisipasi hanya pada lingkup kelompoknya masing-masing.

Polarisasi Sosial dan Hambatan Integrasi Komunitas

Polarisasi sosial antara RW 04 dan RW 10 berdampak pada melemahnya integrasi sosial masyarakat. Hasil pemetaan pohon masalah menunjukkan bahwa konflik menyebabkan stagnasi kegiatan kewilayahan non-keagamaan yang sebelumnya menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Menurunnya interaksi sosial tersebut berdampak pada melemahnya solidaritas sosial, keterbatasan ruang komunikasi informal, serta menurunnya partisipasi kolektif masyarakat.

Hubungan antarpemuda lintas wilayah juga mengalami keterbatasan kolaborasi akibat adanya sentimen kelompok yang berkembang secara laten. Dalam beberapa kegiatan masyarakat, muncul kecenderungan masyarakat membentuk kelompok sosial eksklusif berdasarkan kedekatan wilayah administratif maupun hubungan historis. Meskipun demikian, hasil PRA menunjukkan bahwa pembelahan sosial tersebut tidak sepenuhnya menutup ruang integrasi masyarakat. Di tengah hambatan sosial yang terjadi, terdapat aktivitas sosial tertentu yang tetap mampu mempertemukan warga lintas kelompok, yaitu kegiatan spiritual berbasis keagamaan.

Meskipun polarisasi sosial antara RW 04 dan RW 10 telah menyebabkan fragmentasi hubungan sosial, stagnasi kegiatan kolektif, serta melemahnya solidaritas dan partisipasi masyarakat, temuan PRA menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak bersifat mutlak dan permanen. Keberadaan aktivitas spiritual berbasis keagamaan menjadi indikasi bahwa masih terdapat ruang integrasi sosial yang tumbuh secara organik di tengah masyarakat. Ruang spiritual tersebut berfungsi sebagai "zona netral" yang memungkinkan warga lintas kelompok untuk bertemu, berinteraksi, dan membangun kembali kepercayaan sosial tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan konflik secara formal. Fenomena ini sejalan dengan konsep *everyday peace* yang menegaskan bahwa individu dan komunitas dalam konteks konflik mengembangkan agensi

taktis untuk menavigasi dan keluar dari situasi konflik melalui tindakan-tindakan kecil yang bersifat pro-perdamaian. Mac Ginty menjelaskan bahwa praktik perdamaian sehari-hari sering kali tidak terlihat dalam kerangka formal, namun justru menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan rekonsiliasi di tingkat komunitas¹⁵.

Dengan demikian, polarisasi sosial yang terjadi perlu dipahami bukan sebagai akhir dari proses integrasi komunitas, melainkan sebagai kondisi antara yang menyimpan potensi rekonsiliasi. Aktivitas keagamaan kolektif menunjukkan bahwa integrasi sosial dapat dibangun kembali melalui mekanisme yang bersumber dari nilai dan praktik budaya lokal, bukan semata-mata melalui intervensi administratif dari luar. Temuan ini menegaskan pentingnya mengenali dan memperkuat ruang-ruang sosial informal yang telah terbukti mampu menjembatani perbedaan kelompok dalam masyarakat yang mengalami konflik laten. Hal ini sejalan dengan temuan Firchow yang menunjukkan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam membangun perdamaian, dengan menempatkan suara dan prioritas komunitas lokal sebagai pusat, lebih efektif dibandingkan intervensi eksternal yang mengabaikan ikatan komunitas dan proses penyembuhan sosial. Dalam konteks ini, ritual dan ruang keagamaan bersama dapat berfungsi sebagai medium negosiasi identitas dan konstruksi kerukunan yang berkelanjutan¹⁶.

Spiritualitas sebagai Ruang Rekonsiliasi Sosial

Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas spiritual masyarakat memiliki fungsi sebagai ruang rekonsiliasi sosial antarwarga. Momentum Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), kegiatan *majelis taklim*, pengajian, dan aktivitas keagamaan kolektif lainnya terbukti mampu mempertemukan masyarakat RW 04 dan RW 10 tanpa sekat sosial yang dominan. Hasil diagram venn kelembagaan menunjukkan bahwa institusi keagamaan lokal memiliki tingkat kedekatan emosional paling tinggi dibandingkan lembaga administratif formal. Tokoh agama dan majelis taklim dipandang masyarakat sebagai ruang sosial yang lebih netral, inklusif, dan minim kepentingan kelompok dibanding forum administratif formal.

Aktivitas spiritual tidak hanya dipahami sebagai praktik ibadah, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial informal yang memungkinkan masyarakat membangun kembali komunikasi,

¹⁵ Roger Mac Ginty, *Everyday Peace: How so-Called Ordinary People Can Disrupt Violent Conflict*, Studies in Strategic Peacebuilding (New York, NY: Oxford University Press, 2021), <https://doi.org/10.1093/oso/9780197563397.001.0001>.

¹⁶ Pamina Firchow, *Reclaiming Everyday Peace: Local Voices in Measurement and Evaluation after War* (Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: Cambridge University Press, 2018).

mempererat hubungan sosial, serta memperkuat rasa kebersamaan. Dalam momentum spiritual, batas psikologis antarkelompok cenderung mencair sehingga masyarakat mampu berpartisipasi secara kolektif tanpa membawa sentimen konflik sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan konsep *everyday peace* yang dikembangkan Mac Ginty, yang menegaskan bahwa individu dan komunitas dalam konteks konflik mengembangkan agensi untuk menciptakan ruang-ruang toleransi dan rekonsiliasi melalui tindakan-tindakan kecil yang bersifat pro-perdamaian. Mac Ginty menjelaskan bahwa praktik perdamaian sehari-hari sering kali tidak terlihat dalam kerangka formal, namun justru menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan rekonsiliasi di tingkat komunitas¹⁷. Dalam konteks ini, ritual dan ruang keagamaan bersama berfungsi sebagai medium negosiasi identitas dan konstruksi kerukunan yang berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh studi tentang majelis taklim sebagai fasilitator dialog dan mediator konflik di berbagai komunitas Indonesia. Firchow juga menunjukkan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam membangun perdamaian, dengan menempatkan suara dan prioritas komunitas lokal sebagai pusat, lebih efektif dibandingkan intervensi eksternal yang mengabaikan ikatan komunitas dan proses penyembuhan sosial¹⁸.

Konflik Sosial sebagai Proses Polarisasi Komunitas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial masyarakat RW 04 dan RW 10 berkembang melalui akumulasi pengalaman historis dan sentimen identitas sosial. Kondisi ini sejalan dengan teori konflik Lewis A. Coser yang menjelaskan bahwa konflik sosial muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan, identitas, maupun pengalaman sosial antarkelompok dalam masyarakat.¹⁹ Konflik yang terjadi pada masyarakat Bayah Timur tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang destruktif, tetapi memasuki fase *social freezing*, yaitu kondisi pembekuan hubungan sosial yang ditandai oleh menurunnya interaksi antarkelompok masyarakat.

Trauma konflik masa lalu yang muncul pada forum kepanitiaan masyarakat memperlihatkan bahwa pengalaman emosional kolektif dapat membentuk jarak sosial yang bertahan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, masyarakat menunjukkan kecenderungan

¹⁷ Mac Ginty, *Everyday Peace*.

¹⁸ Hadirman and Musafar, 'Peran Majelis Taklim Dalam Memperkuat Moderasi Beragama Bagi Masyarakat Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara', *Seulanga: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan* 3, no. 2 (December 2024).

¹⁹ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), 35–39.

social withdrawal, yaitu upaya menarik diri dari aktivitas kolektif untuk menghindari potensi konflik yang berulang²⁰.

Selain faktor historis, sentimen identitas antara warga asli dan warga pendatang memperlihatkan adanya pembentukan pola *in-group* dan *out-group* dalam kehidupan komunitas. Situasi tersebut menyebabkan perbedaan kecil dalam forum sosial lebih mudah berkembang menjadi konflik yang lebih luas karena dipersepsikan sebagai representasi kepentingan kelompok.

Dengan demikian, polarisasi komunitas di Bayah Timur dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung secara bertahap, ketika pengalaman konflik masa lalu, kategorisasi identitas, dan menurunnya interaksi sosial saling memperkuat batas antarkelompok. Tajfel dan Turner²¹ menjelaskan bahwa identitas sosial dapat memengaruhi cara individu memandang kelompoknya sendiri (*in-group*) dan kelompok lain (*out-group*), sehingga perbedaan antarkelompok berpotensi memunculkan prasangka dan kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Dalam konteks RW 04 dan RW 10, dinamika tersebut mengindikasikan bahwa konflik tidak harus hadir dalam bentuk pertentangan terbuka, tetapi dapat bertahan melalui jarak sosial, sikap saling waspada, dan keengganan untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Kondisi ini juga berimplikasi pada melemahnya modal sosial, khususnya kepercayaan dan jejaring hubungan yang memungkinkan warga membangun kerja sama lintas kelompok²².

Oleh karena itu, polarisasi yang terjadi di masyarakat Bayah Timur perlu dipahami bukan sekadar sebagai persoalan perbedaan identitas, melainkan juga sebagai tantangan bagi keberlangsungan integrasi sosial di tingkat komunitas. Pemulihan hubungan sosial memerlukan ruang interaksi yang inklusif, komunikasi yang terbuka, serta kegiatan kolektif yang dapat membangun kembali kepercayaan di antara warga. Sejalan dengan pandangan Coser bahwa konflik tidak selalu bersifat merusak karena dalam kondisi tertentu dapat membuka peluang bagi penataan kembali hubungan sosial²³. Namun, dalam konteks penelitian ini, peluang tersebut bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengelola pengalaman konflik secara konstruktif dan mengurangi sekat-sekat sosial yang telah terbentuk. Dengan demikian, upaya

²⁰ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, 45–48.

²¹ Henri Tajfel and John C. Turner, 'An Integrative Theory of Intergroup Conflict', in *The Social Psychology of Intergroup Relations*, ed. William G. Austin and Stephen Worchel (Monterey, Calif: Brooks/Cole Pub. Co, 1979).

²² Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, 1. Touchstone ed, A Touchstone Book (London: Simon & Schuster [u.a.], 2001).

²³ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, International Library of Sociology and Social Reconstruction (London: Routledge and Kegan Paul, 1972).

mengatasi *social freezing* tidak cukup dilakukan dengan mencegah konflik terbuka, tetapi juga perlu diarahkan pada pemulihan interaksi dan penguatan solidaritas sosial agar perbedaan antara warga asli dan warga pendatang tidak terus menjadi sumber polarisasi komunitas.

Spiritualitas sebagai Mekanisme Rekonsiliasi Konflik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki fungsi yang melampaui praktik religius semata, yaitu sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial masyarakat. Aktivitas spiritual melalui PHBI, majelis taklim, dan pengajian menjadi ruang sosial netral yang memungkinkan masyarakat membangun kembali komunikasi informal tanpa tekanan identitas kelompok. Temuan ini sejalan dengan perspektif Émile Durkheim yang menjelaskan bahwa ritual keagamaan memiliki fungsi integratif dalam masyarakat melalui pembentukan *collective consciousness* atau kesadaran kolektif.²⁴ Dalam konteks masyarakat RW 04 dan RW 10, aktivitas spiritual membentuk ruang kebersamaan yang memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi batas psikologis antarkelompok.

Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang spiritual memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding pendekatan administratif formal dalam membangun rekonsiliasi sosial. Ketika forum administratif sering dipersepsikan sebagai arena benturan kepentingan, ruang spiritual justru dipahami sebagai ruang bersama yang memiliki orientasi nilai kolektif, sehingga lebih mudah diterima masyarakat.

Secara keseluruhan, spiritualitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesalahan individu, melainkan menjelma menjadi instrumen resolusi konflik yang organik dan berbasis kultural. Dengan menggeser fokus masyarakat dari dinamika politik-administratif yang memecah belah menuju ruang sakral yang menyatukan, aktivitas spiritual berhasil mengikis residu prasangka antarkelompok secara perlahan. Melalui modal sosial yang terbangun dalam ritual-ritual keagamaan ini, masyarakat RW 04 dan RW 10 mampu mentransformasikan ruang spiritual menjadi fondasi perdamaian yang berkelanjutan, membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai kolektif jauh lebih berdaya guna dalam menjembatani keretakan sosial dibanding intervensi struktural yang kaku.

Dengan demikian, spiritualitas sebagai mekanisme rekonsiliasi konflik perlu dipahami sebagai proses sosial yang memerlukan kesinambungan, keterbukaan, dan keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat. Putnam menegaskan bahwa modal sosial yang terbentuk melalui

²⁴ Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1995), 217–223.

jaringan, norma, dan kepercayaan dapat memfasilitasi koordinasi serta kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama²⁵. Dalam konteks masyarakat RW 04 dan RW 10, aktivitas keagamaan berpotensi memperkuat modal sosial yang menjembatani perbedaan (*bridging social capital*) apabila ruang spiritual terbuka bagi interaksi lintas kelompok dan tidak hanya mempererat solidaritas internal masing-masing kelompok. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi rekonsiliasi spiritual perlu didukung melalui kegiatan keagamaan yang inklusif, dialog antarwarga, dan kerja sama sosial yang melampaui batas identitas. Dengan cara tersebut, nilai-nilai spiritual tidak berhenti pada ritual keagamaan, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari yang memperkuat kepercayaan, mengurangi prasangka, dan membangun perdamaian sosial secara berkelanjutan.

Implikasi bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual berbasis komunitas dapat dipertimbangkan sebagai strategi alternatif dalam resolusi konflik sosial masyarakat. Penguatan aktivitas spiritual bersama tidak hanya meningkatkan religiusitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan solidaritas sosial, kohesi komunitas, serta pembangunan hubungan sosial yang lebih inklusif. Institusi keagamaan lokal, khususnya *majelis taklim*, memiliki posisi strategis sebagai mediator sosial informal yang mampu menjembatani hubungan masyarakat yang mengalami fragmentasi sosial. Dengan demikian, penguatan ruang spiritual komunitas dapat menjadi salah satu strategi pembangunan sosial masyarakat berbasis partisipasi lokal.

Pada akhirnya, penguatan kohesi sosial melalui pendekatan spiritual berbasis komunitas perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan solidaritas internal, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan dan kerja sama lintas kelompok sosial. Maselko, Hughes, dan Cheney menjelaskan bahwa komunitas keagamaan dapat menjadi sumber modal sosial melalui jaringan hubungan, dukungan sosial, dan kepercayaan, meskipun keterlibatan dalam kelompok keagamaan tidak secara otomatis membangun kepercayaan terhadap kelompok di luar komunitasnya²⁶. Oleh karena itu, majelis taklim di Bayah Timur perlu mengembangkan kegiatan yang inklusif, dialogis, dan partisipatif agar nilai-nilai spiritual dapat diterjemahkan menjadi praktik saling menghargai, kepedulian sosial, dan kerja sama antara warga RW 04 dan RW 10. Dengan demikian, pendekatan spiritual tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguatan kehidupan keagamaan,

²⁵ Putnam, *Bowling Alone*.

²⁶ Joanna Maselko, Cayce Hughes, and Rose Cheney, 'Religious Social Capital: Its Measurement and Utility in the Study of the Social Determinants of Health', *Social Science & Medicine* 73, no. 5 (September 2011): 759–67, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.019>.

tetapi juga sebagai landasan pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan melalui pemulihan kepercayaan, pengurangan sekat sosial, dan penguatan integrasi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara masyarakat RW 04 dan RW 10 Kampung Bungkeureuk, Desa Bayah Timur merupakan bentuk konflik horizontal berbasis komunitas yang dipengaruhi oleh faktor historis, sosial-demografis, dan lemahnya komunikasi lintas kelompok. Berdasarkan hasil *Participatory Rural Appraisal* (PRA), konflik dipicu oleh trauma historis akibat perbedaan pendapat dalam kegiatan masyarakat sebelumnya, sentimen identitas antara warga asli dan pendatang, serta minimnya ruang komunikasi sosial yang inklusif. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya polarisasi sosial yang berdampak pada melemahnya solidaritas masyarakat, stagnasi kegiatan kewilayahan non-keagamaan, serta terbatasnya interaksi sosial antarwarga lintas wilayah.

Di tengah kondisi konflik tersebut, penelitian ini menemukan bahwa aktivitas spiritual masyarakat berperan sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial antarwarga. Momentum Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), kegiatan majelis taklim, pengajian, dan aktivitas keagamaan kolektif lainnya terbukti mampu menjadi ruang sosial yang mempertemukan warga tanpa sekat kelompok. Spiritualitas dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas religius, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memungkinkan terbangunnya kembali komunikasi informal, solidaritas sosial, dan rasa kebersamaan masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa institusi keagamaan lokal, khususnya majelis taklim, memiliki posisi strategis sebagai jembatan emosional masyarakat dalam mereduksi ketegangan sosial. Dengan demikian, pendekatan spiritual berbasis komunitas dapat dipertimbangkan sebagai strategi alternatif dalam penguatan kohesi sosial masyarakat yang mengalami konflik horizontal. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, penguatan aktivitas spiritual kolektif memiliki potensi untuk mendorong integrasi sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun hubungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat dipertimbangkan dalam penguatan kohesi sosial masyarakat. Pertama, pemerintah desa dapat mengoptimalkan agenda spiritual bersama sebagai media integrasi sosial antarwilayah masyarakat, khususnya pada komunitas yang mengalami fragmentasi sosial. Kedua, tokoh agama dan institusi keagamaan lokal, seperti majelis taklim, dapat dilibatkan secara lebih aktif sebagai mediator sosial informal dalam upaya mereduksi konflik komunitas. Ketiga, penelitian

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas pendekatan spiritual dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat pada konteks wilayah dan karakteristik komunitas yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert. "Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience." *World Development* 22, no. 9 (1994): 1253–1268.
- Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. International Library of Sociology and Social Reconstruction. London: Routledge and Kegan Paul, 1972.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. California: Sage Publications, 2018.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Durkheim, Émile. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press, 1995.
- Fauzi, M. "Pendekatan Agama dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 15, no. 1 (2021): 77–94.
- Fischer, Klara. 2023. "Using Participatory Rural Appraisal to Research Livelihoods." In *The Routledge Handbook on Livelihoods in the Global South*, edited by Fiona Nunan, Clare Barnes, and Sukanya Krishnamurthy, xx–xx. Routledge International Handbooks. London; New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Firchow, Pamina. *Reclaiming Everyday Peace: Local Voices in Measurement and Evaluation after War*. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2018.
- Hadirman, and Musafar. "Peran Majelis Taklim Dalam Memperkuat Moderasi Beragama Bagi Masyarakat Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara." *Seulanga: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan* 3, no. 2 (December 2024).
- Hidayat, T., and A. Suryana. "Dinamika Konflik Sosial Masyarakat Desa dan Strategi Resolusinya." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 17, no. 2 (2023): 101–119.
- Mac Ginty, Roger. *Everyday Peace: How So-Called Ordinary People Can Disrupt Violent Conflict*. Studies in Strategic Peacebuilding. New York, NY: Oxford University Press, 2021.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197563397.001.0001>.

- Maselko, Joanna, Cayce Hughes, and Rose Cheney. "Religious Social Capital: Its Measurement and Utility in the Study of the Social Determinants of Health." *Social Science & Medicine* 73, no. 5 (September 2011): 759–67. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.019>
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Prasetyo, A. "Kohesi Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Komunitas Lokal." *Jurnal Pemberdayaan Sosial* 8, no. 1 (2022): 55–70.
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. 1st Touchstone ed. A Touchstone Book. London: Simon & Schuster, 2001.
- Ramadhan, F., and L. Putri. "Spiritualitas Kolektif dan Solidaritas Sosial Masyarakat Desa." *Jurnal Community Development* 12, no. 1 (2024): 33–49.
- Resume Hasil PRA Rekonsiliasi Konflik Antarwarga RW 04 dan RW 10 Desa Bayah Timur. Dokumen Internal Praktikum II Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Sulaiman, A. I. "Modal Sosial dalam Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Komunitas* 11, no. 1 (2019): 1–13.
- Tajfel, Henri, and John C. Turner. "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." In *The Social Psychology of Intergroup Relations*, edited by William G. Austin and Stephen Worchel, 33–47. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Co., 1979.